

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini penulis melakukan kajian kepustakaan dengan melihat beberapa penelitian terdahulu supaya dapat memperoleh sumber data yang serupa dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai partisipasi masnyarakat dalam pengembangan Wisata Hutan Pinus di Desa Limpakuwus, diantaranya sebagai berikut:

1. Dinar Wahyuni (2019). “Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat”. Penelitian ini membahas pengembangan Desa Wisata Pentingsari mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pentingsari dan pemerintah daerah melalui partisipasinya dalam kegiatan wisata. Pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan, sosialisasi ke masyarakat dan pemerintah desa hingga pengambilan keputusan tentang pembentukan desa wisata. Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi dilakukan dengan memberikan pemikiran, materi, dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan pengembangan desa wisata serta berupaya menciptakan desa wisata yang siap bersaing di industri pariwisata. Partisipasi dalam tahap menikmati hasil ditunjukkan dengan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat Pentingsari akibat kegiatan wisata. Hal ini berarti bahwa masyarakat menikmati hasil dari kegiatan wisata baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ditunjukkan melalui keterlibatannya dalam pertemuan rutin antar pengelola desa wisata, pemerintah desa, dan pemerintah daerah setempat (Wahyuni, 2019)
2. Adrianto, Syamsurizaldi, Aidinil Zetra (2019). “Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meningkatnya secara signifikan angka kunjungan wisatawan,

khususnya wisatawan mancanegara sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai *branding* pariwisata Provinsi Jambi pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan manajemen program pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen George R. Terry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*, yakni Kepala Bidang dan Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci serta pihak terkait lainnya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci belum dilaksanakan dengan baik, dan masih ditemukan beberapa kendala dalam proses manajemen program. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa hal, seperti penyiapan dokumen perencanaan induk pengembangan pariwisata daerah, meningkatkan koordinasi lintas OPD dengan membentuk Tim, meningkatkan alokasi dan ketepatan penggunaan anggaran, dan peningkatan sumberdaya dan kerjasama dengan *stakeholder* dalam pengelolaan destinasi pariwisata (Andrianto et.al, 2019).

3. Rindo Bagus Sanjaya (2018). “Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pariwisata berdasarkan faktor pendukung dan penghambat pengembangan desa wisata di Desa Kemetul dan menganalisis strategi pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemetul. Penelitian dilakukan di Desa Kemetul Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa Desa Kemetul memiliki banyak potensi wisata untuk dijadikan daya tarik wisata. Desa Kemetul perlu mempertimbangkan penguatan produk unggulan, strategi

pengembangan objek wisata berkelanjutan, dan strategi pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia (Bagus Sanjaya, 2018).

4. M. Agus Sutiarso, K.T. Pratiwi Arcana, N.P. Eka Juliantari, I.M. Bayu Gunantara (2018). “Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Desa Selumbung, Karangasem”. Desa Selumbung merupakan salah satu desa yang diarahkan untuk dikembangkan sebagai desa wisata di Kabupaten Karangasem. Pengembangan wisata berbasis budaya di desa ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila dikelola dan direncanakan dengan baik. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi rencana strategis pengembangan pariwisata berbasis budaya di Desa Selumbung. Penelitian menunjukkan prioritas rencana strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya di Desa Selumbung adalah pengembangan produk wisata, perbaikan pengelolaan dan pemasaran (Agus Sutiarso. et al., 2018)
5. Andi Zulfikar Darussalam, Syarifuddin, Ega Rusanti, A. Darussalam Tajang (2021). “Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi”. *Halal Tourism* merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Potensi pengembangan pariwisata halal di Indonesia sangat besar namun perlu pembaruan dari segi konsep pengembangannya dengan menerapkan nilai- nilai budaya lokal. Salah satu lokasi wisata di Sulawesi Selatan yakni Taman Pra-Sejarah Leang-Leang di Kabupaten Maros menjadi kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata halal dengan mengusung konsep kearifan lokal Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi. Hasil penelitian didapatkan jika budaya Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi mampu diterapkan sebagai konsep pengembangan *Halal Tourism* dengan menjunjung nilai saling memanusiakan, saling mengingatkan serta saling menghormati dalam pelaksanaannya. Selain itu pengembangan juga dapat dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi prasyarat serta karakteristik *Halal Tourism* (Darussalam et al., 2021).

6. Hugo Itamar, A. Samsu Alam, Rahmatullah (2021). "Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja". Penelitian ini menggambarkan tentang strategi pengembangan pariwisata yang direncanakan dan dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu strategi dasar yang bersifat *multiplier effect*, strategi terkait dengan pengelolaan interset pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan produk, strategi pemantapan pemasaran, strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi spasial pengembangan wisata, strategi pengembangan pariwisata bidang distribusi. Dimana dari 7 strategi ini telah dilaksanakan dalam waktu 2011-2016. Akan tetapi ada strategi yang belum berjalan maksimal sehingga hasil yang diinginkan belum tercapai dengan baik. Kemudian Alam, budaya, masyarakat, objek wisata, dan promosi pasar wisata menjadi pendukung pariwisata Tana Toraja. Akses jalan, sarana, sumber daya manusia, peraturan dan landasan hukum, pengelolaan objek wisata ,menjadi faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja (Rambulangi & Batara, 2021).
7. Rola Pola Anto, La Ode Sahili, Sitti Rahmatyah, Eviyanti, Risman Togala (2022). "Manajemen Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Konawe". Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses manajemen pengembangan pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Konawe yaitu rendahnya alokasi dana di sektor pariwisata, serta terbatasnya kualitas maupun kuantitas dari sumber daya manusia yang menyebabkan belum tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan dimensi pengorganisasian dapat dikatakan berjalan dengan baik walaupun dihadapkan dengan jumlah pegawai yang terbatas tetapi dengan kerjasama yang baik, hal tersebut tidak dijadikan alasan terhambatnya pelaksanaan tugas. Dimensi kepemimpinan sudah berjalan dengan baik, pimpinan senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada pegawai dalam bekerja. dan didalam proses pengendalian berjalan cukup baik dengan monitoring dan evaluasi secara berkala (Anto et al., 2022).

8. N. M. Puriati , G. S. Darma (2021). “Menguji Kesiapan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Manajemen Modern Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara menguji kesiapan pengelolaan Desa Wisata Sanur Kaja, berbasis manajemen modern, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu desa dikatakan telah siap diterapkannya manajemen modern. Hasil daripenelitian ini diperoleh bahwa pelaksanaan manajemen modern yang dilakukan oleh Desa Sanur Kaja sebagai desa wisata adalah dengan dimanfaatkannya teknologi informasi dalam melakukan aktivitas pariwisata. Pemanfaatan media teknologi informasi seperti internet dalam upaya mendukung desa wisata adalah pemanfaatan internet sebagai media promosi. Selain pengelola wisata, pelaku-pelaku wisata yang ada di Desa Sanur Kaja juga telah memanfaatkan internet sebagai media promosi. Strategi pemasaran menggunakan *e-commerce* membantu memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan strategi digital marketing baik menggunakan *website* dan media sosial maupun *online marketing mix*. Saran bagi pelaku pariwisata, terutama pelaku usahakecil yang ada di Desa Sanur Kaja perlu melakukan pelatihan mengenai *e-commerce* sebagai sarana promosi (Puriati & Darma, 2021).
9. Neneng Komariah, Encang Saepudin, Pawit M. Yusup (2018). “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal” Kawasan Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran memiliki potensi wisata pedesaan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Desa ini memiliki karakteristik alam yang menarik, kehidupan sosial dan budaya yang unik. Potensi ini harus didorong dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat. Pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat merupakan upaya strategis dalam membangun masyarakat. Pengembangan wisata pedesaan merupakan investasi jangka

panjang dan potensial bagi pemerintah karena sumberdaya manusia dan sumberdaya alam sudah tersedia. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal terutama berkaitan dengan konsep kriteria desa wisata yang ada di desa Paledah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, Forum Group Discussion (FGD), dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan tahapan reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Uji Validitas dan reliabilitas dilakukan melalui proses triangulasi. Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah, masyarakat desa wisata, dan pengembang pariwisata yang berjumlah 9 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata agro di Kabupaten Pangandaran tertuang dalam prinsip-prinsip keorganisasian. Terdapat tiga prinsip pokok keorganisasian yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan kemandirian. Kriteria desa wisata meliputi daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata, pemberdayaan masyarakat, dan pemasaran ataupromosi. Dari kelima kriteria desa wisata di Desa Paledah baru dua yang sudah berjalan maksimal yakni daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan ketiga kriteria lainnya masih memperoleh kendala (Komariah et al., 2018).

10. Maria Fenisia Asni Gabur , Made Sukana (2020). “Manajemen Pariwisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo”. Pulau Padar sebagai salah satu objek wisata utama merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo. Potensi wisatanya menjadi lebih diminati dibandingkan dengan Pulau Komodo dan Rinca. Praktek kepariwisataan di kawasan Taman Nasional Komodo ini tidak serta merta menuntut pengelolaan kepariwisataan secara khusus. Fokus dari Balai Taman Nasional Komodo adalah konservasi dan pelestarian. Hasil penelitian ini menjawab tiga permasalahan utama yang diangkat yaitu

pertama tentang profil pariwisata Pulau Padar terkait dengan basis atraksi, aksesibilitas, amenitas dan *ancillary*. Yang kedua berkaitan dengan pengelolaan pariwisata yang meliputi permintaan dan penawaran, pengaruh pariwisata terhadap kondisi alam, bentuk interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan kegiatan pariwisata di Pulau Padar dan yang ketiga berkaitan dengan strategi pengelolaan sumber daya di Pulau Padar oleh pihak Taman Nasional Komodo (Gabur & Sukana, 2020).



Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dinar Wahyuni (2019)	Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengembangan Desa Wisata Pentingsari dalam perspektif partisipasi masyarakat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Pentingsari mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pentingsari dan pemerintah daerah melalui pemerintah daerah melalui partisipasinya dalam kegiatan wisata.	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek tertuju pada sasaran program	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian
2.	Adrianto, Syamsurizaldi, Aidinil Zetra (2019).	“Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci”.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif	Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan manajemen program pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengembangan destinasi pariwisata Kerinci belum dilaksanakan dengan baik, dan masih ditemukan beberapa kendala dalam proses manajemen program. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa hal, seperti penyiapan dokumen perencanaan induk pengembangan pariwisata daerah, meningkatkan koordinasi lintas OPD dengan membentuk Tim, meningkatkan alokasi dan	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian, teori yang digunakan, dan objek tertuju pada sasaran program

					ketepatan penggunaan anggaran, dan peningkatan sumberdaya dan kerja sama dengan stakeholder dalam pengelolaan destinasi pariwisata.
3.	Rindo Bagus Sanjaya (2018).	"Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang".	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi Pariwisata berdasarkan faktor pendukung dan Penghambat Pengembangan desa wisata di Desa Kemetul dan Menganalisis strategi pariwisata Berbasis masyarakat di Desa Kemetul.	Kajian tersebut menyimpulkan bahwa Desa Kemetul memiliki banyak potensi wisata untuk dijadikan daya tarik wisata. Desa Kemetul perlu mempertimbangkan penguatan produk unggulan, strategi pengembangan objek wisata berkelanjutan, dan strategi pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.
4.	M. Agus Sutiarsa, K.T. Pratiwi Arcana, N.P. Eka Juliantri, I.M. Bayu Gunantara (2018).	"Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Desa Selumbung, Karangasem".	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk Mendapatkan Rekomendasi rencana strategis Pengembangan pariwisata berbasis budaya di Desa Selumbung.	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek tertuju pada sasaran Program

5.	Andi Zulfikar Darussalam, Syarifuddin, Ega Rusanti, A. Berbasis Darussalam Tajang (2021).	“Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Kearifan Lokal Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi”.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif	Kajian ini bertujuan agar mampu diterapkan sebagai konsep pengembangan <i>Halal Tourism</i> dengan menjunjung nilai saling memanusiakan, saling mengingatkan serta saling menghormati dalam pelaksanaannya. Selain itu pengembangan juga dapat dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi prasyarat serta karakteristik <i>Halal Tourism</i>	Hasil penelitian didapatkan jika budaya Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi mampu diterapkan sebagai konsep pengembangan <i>Halal Tourism</i> dengan menjunjung nilai saling memanusiakan, saling mengingatkan serta saling menghormati dalam pelaksanaannya. Selain itu pengembangan juga dapat dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi prasyarat serta karakteristik <i>Halal Tourism</i>	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian dan objek tertuju pada sasaran program
6.	Hugo Itamar, A. Samsu Alam, Pengembangan Rahmatullah (2021).	“Strategi Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja”.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif	penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang telah direncanakan dan dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan Tana Toraja dalam pengembangan pariwisata dan berjalan maksimal sehingga berjalan maksimal sehingga hasil yang diinginkan belum sejauh mana tercapai dengan baik. strategi ini telah berjalan, serta Kemudian untuk mengetahui apa saja faktor yang kemudian	Penelitian ini menggambarkan tentang strategi pengembangan pariwisata yang direncanakan dan dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. Strategi ini telah dilaksanakan dalam waktu 2011-2016. Akan tetapi ada strategi yang belum berjalan maksimal sehingga hasil yang diinginkan belum sejauh mana tercapai dengan baik. Kemudian untuk mengetahui apa saja faktor yang kemudian	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian dan objek tertuju pada sasaran program

			mempengaruhi dalam pengembangan pari-wisata di Tana Toraja	Toraja. Akses jalan, sarana, sumber daya manusia, peraturan dan landasan hukum, pengelolaan objek wisata ,menjadi faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja	
7.	Rola Pola “Manajemen Deskriptif Anto, La Ode Pengembangan kualitatif. Sahili, Sitti Pariwisata Pada Rahmatyah, Dinas Eviyanti, Kepemudaan, Risman Togala Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Konawe” (2022)	Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Manajemen Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata Kabupaten	Pada Kabupaten Konawe pada dasarnya ditinjau dari proses perencanaan belum optimal karena anggaran yang masih terbatas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengembangan pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Perbedaan dengan tempat dan waktu penelitian dan dan objek tertuju pada sasaran program
8.	N. M. Puriati , “Menguji G. S. Darma Kesiapan menggunakan Pengelolaan Desapendekatan Wisata Berbasiskualitatif field Manajemen research Modern Sebagai method. Penggerak Ekonomi Rakyat”.	Tujuan penelitian ini diperoleh bahwa pelaksanaan	dari Hasil dari penelitian ini	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Perbedaan dengan tempat dan waktu penelitian dan dan objek tertuju pada sasaran program	

9.	Neneng Komariah, Encang Saepudin, Pawit M. Yusup (2018).	"Pengembangan Penelitian ini Tujuan dalam Kawasan Desa Paledah yang Perbedaan dengan pada penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian dan dan objek tertuju pada sasaran program
		dikatakan telah siap diterapkannya manajemen modern. promosi. Selain pengelola wisata, pelaku-pelaku wisata yang ada di Desa Sanur Kaja juga telah memanfaatkan internet sebagai media promosi. Strategi pemasaran menggunakan e-commerce membantu memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan strategi digital marketing baik menggunakan website dan media sosial maupun online marketing mix. (Puriati & Darma, 2021)

					wisata pedesaan merupakan investasi jangka panjang dan potensial bagi pemerintah karena sumberdaya manusia dan sumberdaya alam sudah tersedia.
10.	Maria Feninsia “Manajemen Asni Gabur , Pariwisata Made Sukana Pulau Padar,sumber (2020).	Penelitian iniPenelitian ini dimenggunakan dilakukan guna dapat datamemberikan danrekomendasi-	Hasil penelitian ini menjawab Persamaan yang Perbedaan dengan tiga permasalahan utamayang terdapat diangkat yaitu pertama tentang profil pariwisata sama-sama pada penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian dan dan	Pulau Padar terkait dengan menggunakan metode kualitatif	objek tertuju pada sasaran program

Sumber: Data Olah Penulis

B. Landasan Teori

1. Administrasi Publik

Perkembangan administrasi di era ini telah mencapai pada kehidupan komunitas masyarakat dan menjadi kebutuhan dan memberikan manfaat untuk usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sehingga memberikan manfaat kepada publik (Hajar, et al., 2022).

Perkembangan administrasi kini makin meluas dan mengarah perkembangan keilmuan administrasi publik. Keberadaan administrasi publik merupakan sebuah proses pemikiran rasional dan penalaran yang matang dalam aktu jangka panjang secara efisien dan efektif dalam mewujudkannya (Hajar, et al., 2022)..

Administrasi Publik adalah ilmu dan seni yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi publik secara rasional bekerja sama untuk mencapai tujuan publik pengertian administrasi publik yang lebih luas adalah proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi publik secara rasional melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap orang dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan publik yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (Erika, et al., 2020). F.W.A Taylor, Henry Fayol, dan Woodrow Wilson mengemukakan Paradigma atas tiga kelompok, antara lain :

- *Old Public Administration (OPA)*

Paradigma Old Public Administration (OPA) atau dikenal juga sebagai Administrasi Publik Klasik atau Administrasi Publik Lama diawali dari sebuah gerakan perubahan yang di gagas oleh seorang tokoh bernama Woodrow Wilson tentang dikotomi antara politik dan administrasi yang berpikir bahwa administrasi publik harus dipisahkan dengan dunia politik (Supriyadi, 2021). (Ahmad, 2012) mengatakan fokus ilmu administrasi publik terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan, politik dan kebijakan merupakan substansi

ilmu politik. Fokus paradigma ini adalah mempermasahkan dimana seharusnya administrasi publik berada pada masa ini dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik Negara. Fase ini ditandai dengan buku yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White berjudul “*Politics and Administration*” yang berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintah yang berbeda satu sama lain yaitu politik dan administrasi. Menurut Goodnow, administrasi publik seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintah (Supriyadi, 2021).

- *New Public Management* (NPM)

Inti dari *New Public Management* berbunyi: ”Segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi warga adalah pemborosan.” Kalimat ini mengungkapkan bahwa administrasi bukanlah tujuan akhir, dan ia hanya punya satu tugas, yakni memberikan layanan kepada rakyat yang memang berhak mendapatkannya. Di beberapa negara pernah dikembangkan apa yang disebut “*citizen charter*” (kontrak pelayanan) yang merangkum hak-hak apa saja yang dimiliki warga sebagai pembayar pajak kepada negara. Ini artinya, warga tidak lagi dilihat sebagai abdi, melainkan sebagai pelanggan yang karena pajak yang dibayarkannya mempunyai hak atas layanan dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu pula (Widnyani, 2017).

Prinsip dalam *New Public Management* yaitu

- a) Dekat dengan warga atau pelanggan,
- b) Memiliki mentalitas melayani dan luwes,
- c) Inovatif dalam memberikan layanan jasa kepada warga.

Menurut Huges bahwa penerapan konsep *New Public Management* telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau

desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Widnyani, 2017).

- *New Public Service (NPS)*

Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *New Public Service* adalah bahwa pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan komunitas. Ini mengandung makna bahwa karakter dan nilai yang terkandung dalam pelayanan publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Di samping itu, pelayanan publik model baru harus bersifat non diskriminatif sebagaimana dasar teoretis yang digunakan, yakni teori demokrasi yang menjamin adanya persamaan di antara warga negara, tanpa membeda-bedakan asal usul warga negara, kesukuan, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian. Ini berarti setiap warga negara diperlakukan sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik untuk menerima pelayanan sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Hubungan yang terjalin antara birokrat publik dengan warga negara adalah hubungan impersonal sehingga terhindar dari sifat nepotisme dan primordialisme (Widnyani, 2017).

Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Suatu sistem yang baik akan memberikan prosedur pelayanan yang terstandar dan memberikan mekanisme kontrol di dalam dirinya (*built in control*). Dengan demikian segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah diketahui. Sistem pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan customers. Ini berarti organisasi harus mampu merespons kebutuhan dan keinginan customers dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang

tepat. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh jajaran aparatur birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kompetensi aparatus, kualitas peralatan yang digunakan untuk memproses jenis pelayanan, budaya birokrasi, dan sebagainya. Kompetensi aparatus birokrasi merupakan akumulasi dari sejumlah subvariabel seperti tingkat pendidikan, jumlah tahun pengalaman kerja, variasi pelatihan yang telah diterima. Sedangkan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan akan mempengaruhi prosedur dan kecepatan output yang akan dihasilkan. Apabila organisasi menggunakan teknologi modern, seperti komputer, maka metode dan prosedur kerja akan berbeda dengan ketika organisasi menggunakan cara kerja manual (Widnyani, 2017).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa paradigma Administrasi Publik pada penelitian yang akan dilakukan lakukan sesuai dengan paradigma *New Public Management* (NPM) karena manajemen pariwisata yang dilakukan oleh kelompok kerja dengan tujuan untuk mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan PAD di Desa Limpakuwus.

2. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan manajemen instansi pemerintah. Overman (dalam Pasolong, 2010) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific management*”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “*scientific management*”. Manajemen publik bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi “rasional-instrumental” pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain (Chadijah et.al.2012). Manajemen publik menurut Laurence Lynn mempertimbangkan tiga kemungkinan tentang gambaran manajemen publik

yaitu sebagai seni (*art*), ilmu (*science*), dan profesi (*profession*). Yang dimaklum Lynn mengenai manajemen publik sebagai seni adalah aktivitas kreatif yang dilakukan oleh para praktisi yang tidak bisa dipelajara dengan cara dihitung. Artinya manajemen publik adalah sebuah aktivitas yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dan sangat tergantung dari situasi dan kondisi dimana beroperasi (Wijaya & Danar, 2014).

Manajemen publik sebagai bagian dari administrasi publik adalah ilmu dan seni dengan inti metodologi terapan untuk pemrograman administrasi publik, restrukturisasi organisasi, kebijakan dan perencanaan manajemen, alokasi sumber daya, sistem anggaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, pertanyaan audit dan evaluasi program. Secara lebih khusus sering dikatakan bahwa administrasi publik memandang administrasi publik sebagai profesi, sedangkan administrasi publik memandang manajer publik sebagai praktisi (I Made, 2021).

Wilson menetapkan empat prinsip dasar kajian administrasi publik yang membentuk administrasi publik hingga saat ini, yaitu:

- Pemerintah sebagai setting utama organisasi,
- Fungsi eksekutif sebagai fokus utama,
- Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi,
- Metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi publik (Aulia et.al.2016).

3. Manajemen Pariwisata

Manajemen pariwisata terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan pariwisata. Manajemen adalah proses mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain. Pengertian manajemen pariwisata disampaikan oleh beberapa ahli sebagai berikut;

- Darwis (2019) menyatakan manajemen pariwisata adalah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dengan layanan pariwisata, perlindungan lingkungan dan konservasi keanekaragaman budaya.

- Bambang & Roedjinandari (2017) mengatakan manajemen pariwisata pada dasarnya menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya pariwisata, interaksi antara wisatawan dengan alam dan masyarakat lokal di daerah tujuan wisata.
- Gabur & Sukana (2020) menyampaikan manajemen pariwisata sebagai suatu instrumen yang spesifik digunakan agar sebuah instansi dapat mencapai hasil guna mendapatkan fasilitas destinasi pelayanan yang mengacu dengan kepariwisataan.

Menurut Damanik dan Teguh, 2013 (Dalam Adi et.al,2022) Manajemen pariwisata memiliki unsur-unsur seperti layaknya fungsi-fungsi manajemen. Unsur-unsur manajemen pariwisata tersebut terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

a) Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam manajemen pariwisata. Keseluruhan proses manajemen pariwisata tidak dapat dilakukan tanpa didahului oleh perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan merupakan titik awal dari setiap kegiatan pengembangan, pemasaran, dan promosi pariwisata.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen pariwisata. Berdasarkan dari perencanaan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan seluruh sumber daya yang ada. Hal terpenting dalam pengorganisasian adalah menentukan dan mengalokasikan sumber daya sebagai subyek yang melaksanakan kegiatan manajemen pariwisata, beserta pengaturan berbagai fungsi para pelaksana di dalam kegiatan manajemen pariwisata tersebut. Pengorganisasian yang dilakukan dengan baik dapat mempermudah implementasi rencana yang sudah disusun sebelumnya.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan fungsi ketiga dari manajemen pariwisata. Perencanaan yang didukung oleh pengorganisasian yang tepat akan berujung pada pelaksanaan yang tepat. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan seperti yang diungkapkan Damanik dan Teguh (2013), diantaranya : Pengembangan atraksi atau daya tarik, aksesibilitas, dan amenitas secara fisik; Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kompetensinya; Penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata; dan perluasan intensitas maupun cakupan promosi pariwisata.

d) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi terakhir dari manajemen pariwisata. Kegiatan ini berfungsi untuk mengetahui apakah implementasi sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak, serta untuk mengetahui seberapa efektif capaian yang telah diraih. Monitoring mencakup kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi implementasi manajemen pariwisata mengidentifikasi berbagai hambatan pelaksanaan manajemen pariwisata untuk menemukan solusinya, sedangkan kegiatan evaluasi bertujuan untuk menemukan bukti pencapaian tujuan manajemen pariwisata serta tingkat efektifitasnya.

Berdasarkan teori manajemen pariwisata di atas, maka penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan teori Damanik dan Teguh, (2013). karena teori tersebut sesuai dengan apa yang akan di teliti dimana manajemen pariwisata dapat dilakukan dengan serangkaian proses dengan melakukan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

4. Pariwisata

Charles R. Goeldner dan J.R. Brent Ritchie (2003) mendefinisikan pariwisata dengan penekanan pada “proses, aktivitas dan hasil interaksi wisatawan, penyedia pariwisata, pemerintah dan masyarakat lokal serta lingkungan yang terlibat dalam menarik dan menerima pengunjung”

(Marysyia & Amanah, 2018). Pariwisata sebagai suatu industri

mencakup banyak aspek kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pariwisata. Nyoman S. Pendit (2003) mengusulkan bahwa industri pariwisata mencakup unsur-unsur dasar sebagai berikut:

- Kebijakan Pemerintah, unsur ini menyangkut politik dan situasi politik di suatu negara yang mempengaruhi keputusan calon wisatawan untuk berkunjung ke negara tersebut. Situasi politik yang kondusif memastikan para wisatawan yang datang ke negara tersebut merasa aman dan nyaman. Politik politik yang dapat menimbulkan gejolak politik, apalagi pertumpahan darah, dan gejolak politik membuat calon wisatawan takut untuk berkunjung.
- Properti dirancang untuk membangkitkan rasa penasaran calon wisatawan, yang pada gilirannya akan mengarahkan mereka untuk datang dan mengeksplorasi lokasi destinasi tersebut. Oleh karena itu, industri pariwisata harus mampu membangkitkan rasa penasaran calon wisatawan, bila perlu membuat mereka penasaran.
- Sifat ramah tamah, suatu ciri yang harus ditampilkan oleh semua penyelenggara pariwisata di suatu daerah atau negara, termasuk anggota masyarakat yang menjadikan dirinya atau daerah tempat tinggalnya sebagai daerah tujuan wisata. Keramahan penduduk lokal dan perusahaan wisata sangat penting untuk menjaga wisatawan dan bahkan dapat menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.
- Jarak dan waktu (aksesibilitas), dapat dengan mudah mencapai tujuan melalui jarak yang wajar dan waktu yang tidak terlalu lama merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan industri pariwisata. Lokasi destinasi wisata yang terlalu jauh dan membutuhkan waktu lama untuk dijangkau seringkali membuat calon wisatawan enggan untuk berkunjung
- Atraksi, suatu tempat tujuan wisata harus memiliki daya tarik yang cukup yang dapat menarik perhatian calon wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Ini termasuk cara menghubungkan berbagai atraksi yang ditampilkan atau ditawarkan kepada calon wisatawan dengan cara yang membangkitkan rasa ingin tahu

mereka atau membuat mereka ingin melihat dan menikmati.

- Akomodasi, ketersediaan tempat istirahat yang sesuai dengan standar wisatawan, jumlah yang cukup dengan harga dan pelayanan yang bervariasi merupakan elemen penting dalam industri pariwisata.
- Transportasi, transportasi yang wajar adalah sarana transportasi utama yang mengantar wisatawan ke tempat-tempat wisata. Wisatawan membutuhkan ketersediaan berbagai sarana transportasi untuk melakukan perjalanan ke tempat wisata dan kembali ke akomodasi mereka. Ketersediaan sarana transportasi yang memadai harus diimbangi dengan pelayanan jalan yang berkualitas.
- Harga, untuk mendukung keberhasilan industri pariwisata, harga yang ditawarkan kepada wisatawan harus masuk akal. Harga yang terlalu tinggi, meskipun kualitas produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan berkaitan dengan pengembangan daerah tujuan dan daya tarik wisata. Daya tarik destinasi wisata merupakan salah satu sumber daya penting yang harus dimiliki untuk meningkatkan dan mengembangkan destinasi wisata, karena faktor utama yang membuat pengunjung atau wisatawan berkunjung ke destinasi wisata adalah potensi dan daya tarik destinasi wisata tersebut.

(Mario Barreto, 2015) mengungkapkan Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah:

- Kualitas objek wisata yaitu bagaimana untuk mengupayakan dan menjaga kelestarian alam
- Keunikan agar banyak pengunjung dapat rekreasi.
- Promosi melalui media sosial (instagram), youtube dan website
- Sumber daya manusia yang menjaga kelestarian objek wisata
- Inovasi objek wisata yakni bagaimana untuk melestarikan objek wisata yang baik(Roni et al., 2020)

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005) dalam Septa (2011) menjelaskan bahwa pada dasarnya pembangunan kepariwisataan ditujukan untuk mencapai tujuan pokok sebagai berikut :

- a. Persatuan dan kesatuan pariwisata tanah air mungkin dapat

menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia melalui pariwisata yang dilakukan oleh penduduk di seluruh negeri. Dampak yang diharapkan adalah banyaknya warga yang berkunjung ke daerah di luar tempat tinggalnya sebagai wisatawan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan pemahaman akan keberagaman, sehingga memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

- b. Memberantas Kemiskinan, dengan berkembangnya pariwisata diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bereksplorasi dan berkarya. Kunjungan wisatawan diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah tujuan wisata, baik melalui tenaga kerja yang dibutuhkan daerah tujuan wisata maupun melalui industri-industri di sekitar daerah tujuan wisata.
- c. Pembangunan berkelanjutan, arena sifat kegiatan pariwisata, yang pada dasarnya menawarkan keindahan alam, keragaman budaya dan keramahan dan pelayanan, sangat sedikit sumber daya yang didevlokasi untuk mendukung kegiatan ini. yaitu konsumsi sumber daya yang dapat dikonsumsi biasanya sangat rendah, sehingga dapat dikelola dengan baik dalam waktu yang relatif lama dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan.
- d. Pelestarian budaya, dengan adanya pengembangan pariwisata diharapkan dapat benar-benar memberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam resolusi bersama mereka pada tahun 2002, UNESCO dan UN-WMO menyatakan bahwa pariwisata adalah instrumen terpenting untuk melestarikan budaya. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya masyarakat Indonesia melakukan upaya pengembangan pariwisata untuk melestarikan budaya di berbagai bidang.
- e. Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia. Pariwisata telah menjadi salah satu kebutuhan pokok kehidupan masyarakat modern. Bagi sebagian orang, perjalanan bahkan dikaitkan dengan hak asasi manusia, terutama melalui liburan panjang dan paket liburan berbayar.
- f. Pembangunan ekonomi dan industri, Apabila pariwisata dikelola

dengan baik dan berkelanjutan, diharapkan pariwisata dapat memberikan peluang pertumbuhan ekonomi di sekitar daerah tujuan wisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses jasa pariwisata memberikan peluang kepada industri lokal untuk berpartisipasi dalam produksi barang dan jasa.

- g. Perkembangan teknologi yang semakin kompleks dan persaingan yang tinggi kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Sehingga pada akhirnya pada daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang mampu memberikan dukungan bagi terciptanya kegiatan ekonomi yang lain. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Eko, 2019).

5. Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, politik dan pelayanan pemerintahan. Partisipasi mempunyai arti penting dalam kegiatan pembangunan dimana pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan menurut Kaho (PMD Kemendagri, 2008): Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan pembangunan, bersama dengan faktor lain seperti tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan dan kewenangan hukum (Hakim, 2017).

Konsep partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1980), yang menjelaskan partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara kerjanya; Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dengan menyumbangkan sumber daya atau berkolaborasi dalam suatu organisasi; dan partisipasi masyarakat dalam memetik manfaat pembangunan dan mengevaluasi pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat dengan

demikian adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam semua proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Dalam hal ini, masyarakat adalah subyek dan bukan obyek pembangunan dan karenanya harus berperan aktif dalam semua proses. Menurut Keith Davis dan Newstrom (1989) dalam (Wahyuni, 2019), partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok, yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab atas pencapaian tujuan kelompok. Ide utamanya adalah partisipasi, kontribusi dan tanggung jawab. Pariwisata secara umum merupakan kegiatan yang secara langsung mempengaruhi dan berpartisipasi dalam masyarakat dan juga menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat di daerah yang memiliki potensi wisata (Citra, 2018)

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) adalah realisasi dari kemauan dan kemampuan anggota. masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan program/proyek yang dilaksanakan (Adisamita, 2006). Dalam pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, tujuannya lebih tepat sasaran yaitu urutan berdasarkan derajat kepentingan agar realisasi (pelaksanaan) program pembangunan juga dilaksanakan secara efektif dan efisien (Adisamita, 2013) dalam (Vga & Hakim, 2018). Nuring (2013) dalam (Singgalen & Kudubun, 2017) berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat mengatasi masalah ketimpangan yang disebabkan oleh kesenjangan antara masyarakat lokal dan pemangku kepentingan.

Menurut Efendi (dalam Irene, 2015) partisipasi dapat dibagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

- Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawah, pengikut atau klien
- Partisipasi horizontal yaitu setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya

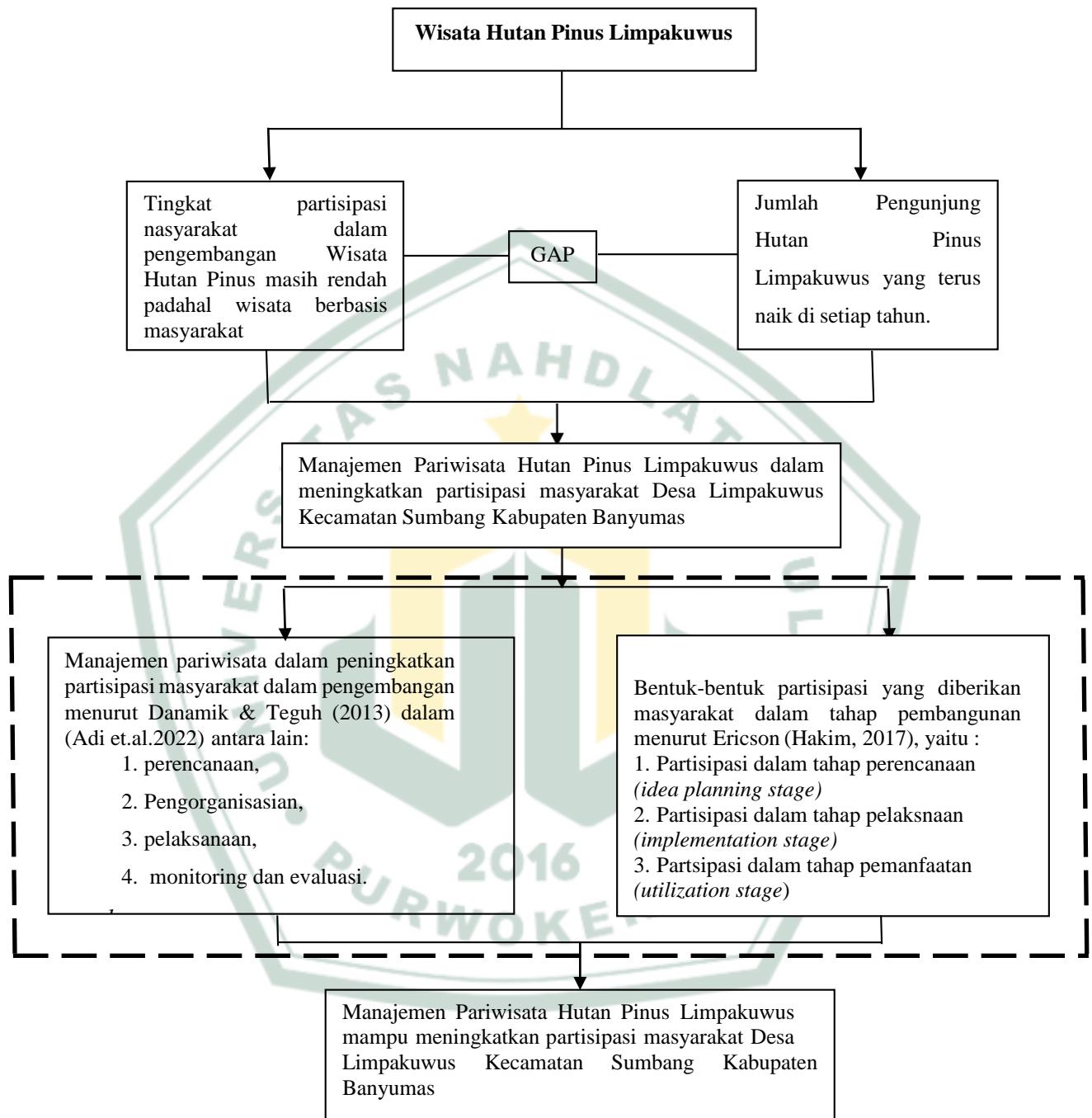
masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan menurut Ericson (Hakim, 2017), yaitu :

- a. Partisipasi dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*). Berpartisipasi dalam tahap ini berarti melibatkan seseorang dalam tahap penyusunan rencana dan strategi, menyiapkan kepanitiaan dan anggaran untuk kegiatan/proyek tersebut. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan saran, saran dan kritik sebagai bagian dari pertemuan yang diadakan.
- b. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi dalam tahap implementasi. Partisipasi dalam fase ini berarti seseorang akan terlibat dalam fase kinerja/implementasi pekerjaan proyek. Masyarakat dapat menawarkan bantuan pekerjaan, uang atau bahan/barang, dan ide sebagai bentuk partisipasi dalam pekerjaan.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan (*utilization stage*). Partisipasi dalam tahap ini berarti melibatkan seseorang dalam tahap eksploitasi pekerjaan/proyek setelah proyek selesai. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk pelaksanaan dan pemeliharaan proyek yang dibangun.

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat di atas, maka penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan teori dari Ericson karena teori tersebut sesuai dengan apa yang akan di teliti dimana partisipasi masyarakat dilakukan dengan serangkaian proses dengan melakukan suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Di olah Penelitian

Keterangan
Fokus penelitian: — —